

Daftar Pustaka

A. Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Fahmal, H.A.Muin, 2006, *Peran Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pers
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press
- Spelt, N.M dan J.B.J.M. ten berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*. Disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*, Bandung: Alfabeta
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marbun S.F, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: FH UII Press
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Munawar, Ahmad, 2005, *Dasar – Dasar Teknik Transportasi*, Yogyakarta: Beta Offset
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Kybernology*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594)

- Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474)
- Peraturan Kapolri No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor)
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 59 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 33)
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346)
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 133 tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. 1296)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

C. Makalah/Jurnal

- Basah, Sjachran, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
- Listyawati, Hery dan Tryanti Suharsono, 2012, *Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi di Kabupaten Sleman*, Mimbar Hukum, Jurnal Vol. 24 Nomor 1. Fakultas Hukum UGM
- Sulasno, 2012: *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2

D. Skripsi/ Thesis/ Disertasi

- Neta Eriena, *Analisis Yuridis tentang Izin Operasional GO-JEK di Yogyakarta dalam kaitannya dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan*, Skripsi, Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016
- Wd. Adhinda Putri Syara Lestari Syahbuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Pengguna Jasa Transportasi berbasis Aplikasi Pada PT. GO-JEK Indonesia*, Skripsi, Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016

E. Internet

- <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/24/090000126/ini.penjelasan.11.poin.revisi.pm.32.2016.tentang.taksi.online>. Diakses pada 11 November 2017 pukul 23:00
- <https://news.detik.com/berita/d-3425021/tolak-taksi-online-ribuan-sopir-taksi-di-yogyakarta-demo>. Diakses pada 18 April 2018 pukul 04:44
- <https://news.detik.com/berita/d-3609587/perjalanan-kisruh-taksi-online-berujung-pencabutan-aturan-oleh-ma>. Diakses pada 11 Nopember 2017 pukul 23:49
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180214130408-384-276146/tolak-permenhub-sopir-taksi-aliando-demo-di-depan-istana> diakses pada Rabu 18 Februari 2018 Pukul 00:15
- <https://www.politico.eu/article/uber-ecj-ruling>. Diakses pada 2 Mei 2018 Pukul 20:00